

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2021), wilayah Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi dengan luas keseluruhan 1.916.906,7 km² yang terdiri atas daratan dan lautan. Jumlah wilayah administratif yang terpisah-pisah dalam 16.056 pulau menyebabkan kesulitan tersendiri dalam proses perencanaan wilayah untuk pembangunan nasional. Kesulitan tersebut berupa sulitnya pemeratakan pembangunan antarwilayah di Indonesia.

Ketimpangan pembangunan wilayah masih menjadi masalah yang dihadapi beberapa wilayah di Indonesia. Hal tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang tinggal di daerah perdesaan. Ketimpangan tersebut berupa ketimpangan akses sarana publik, transportasi, pusat kegiatan ekonomi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, diperlukan sistem perencanaan wilayah yang matang agar tercipta pembangunan nasional yang merata.

Definisi wilayah secara garis besar adalah hamparan permukaan bumi yang batas luasnya didasarkan pada karakteristik fisik dan geografis (Kustiwan, 2014). Menurut Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang pasal 1 ayat (1), wilayah adalah “ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap

unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional”. Secara konsep, terdapat lima jenis wilayah yaitu wilayah homogen, wilayah nodal, wilayah pesisir, wilayah perencanaan/pengelolaan khusus, dan wilayah administratif. Di Indonesia, wilayah administratif terbagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu tingkatan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Analisis hierarki wilayah sangat perlu diperhatikan dalam perencanaan wilayah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi V (daring), hierarki adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan (pangkat kedudukan). Dari definisi tersebut, hierarki wilayah dapat diartikan sebagai urutan tingkatan wilayah. Menurut Tarigan (2005), hierarki perkotaan timbul karena perbedaan jumlah, jenis, dan kualitas dari fasilitas yang tersedia pada kota tersebut.

Pemusatan kegiatan umumnya terjadi pada daerah perkotaan di suatu wilayah. Menurut Warsito (2020), daerah perkotaan memiliki karakteristik yang terlihat jelas jika dibandingkan dengan daerah lain, yaitu memiliki area terbangun yang lebih besar daripada area pertanian, kepadatan penduduk yang tinggi, keadaan penduduk heterogen, dan perekonomian yang didominasi oleh sektor nonagraris. Daerah perkotaan akan memberikan pengaruh terhadap daerah di sekitarnya, terutama daerah perdesaan. Pengaruh tersebut menyebabkan ketergantungan dari daerah perdesaan terhadap daerah perkotaan sehingga dapat ditentukan urutan tingkatannya. Menurut Tarigan (2005), kota yang memiliki pengaruh paling kuat akan berada pada tingkatan satu atau orde kesatu, sedangkan daerah yang memiliki pengaruh lebih kecil akan berada pada tingkatan dua, dan seterusnya.

Ketersediaan fasilitas umum yang tersedia pada setiap wilayah harus sebanding dengan luas pengaruh wilayah tersebut, tata guna lahan, dan jumlah penduduk yang diperkirakan akan memanfaatkan fasilitas tersebut. Penyediaan fasilitas umum tidak hanya berkaitan dengan jenisnya, tetapi juga dengan kualitas dan besarnya kapasitas untuk melayani masyarakat. Menurut Koestoer (1995, dikutip dalam Nirwani, 2014), peningkatan jumlah penduduk akan diikuti dengan peningkatan fasilitas sehingga akan menimbulkan hierarki wilayah. Semakin besar penduduk dalam suatu wilayah, semakin banyak pula jumlah fasilitas umum yang harus tersedia. Bila jumlah fasilitas tidak mencukupi, akan terjadi urbanisasi secara besar-besaran yang dapat menyebabkan terbentuknya kota raksasa. Analisis hierarki dapat digunakan untuk mendorong efisiensi dalam biaya pembangunan dan biaya pemeliharaan fasilitas, tetapi tetap dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain digunakan untuk memperatakan pembangunan, hierarki wilayah juga dapat digunakan untuk menentukan nilai properti yang wajar pada wilayah tertentu. Dalam pendekatan data pasar, nilai properti tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal properti tersebut, tetapi juga kemudahan terhadap akses fasilitas umum di sekitarnya. Properti yang memiliki akses menuju fasilitas umum yang baik akan memberikan kemudahan bagi pemiliknya sehingga secara umum pembeli bersedia membayar lebih untuk properti ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dianalisis pada Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini antara lain:

- 1) Bagaimana kondisi geografis, kependudukan, serta ketersediaan fasilitas pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Kulon Progo?
- 2) Bagaimana hierarki wilayah pada tingkat kecamatan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan jumlah penduduk, ketersediaan fasilitas, dan daya tarik antarwilayah tiap kecamatan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang ingin dicapai setelah penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini meliputi

- 1) mengetahui kondisi geografis, kependudukan, serta ketersediaan fasilitas pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Kulon Progo, dan
- 2) menganalisis hierarki wilayah pada tingkat kecamatan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan jumlah penduduk, ketersediaan fasilitas, dan daya tarik antarwilayah tiap kecamatan.

1.4 Ruang Lingkup

Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini akan membahas mengenai hierarki wilayah pada tingkat kecamatan tahun 2020 karena data tahun 2021 tidak tersedia sampai masa penyusunan KTTA selesai. Wilayah analisis yang akan dibahas meliputi Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode yang akan digunakan untuk menganalisis hierarki wilayah pada karya tulis ini adalah analisis model Christaller, analisis model gravitasi, serta analisis model skalogram dan indeks sentralitas.

Data yang digunakan merupakan data sekunder yang dapat diperoleh dari publikasi beberapa instansi pemerintah. Model Christaller menggunakan data jumlah penduduk tiap kecamatan di Kulon Progo. Model gravitasi menggunakan data jumlah penduduk untuk mengetahui pemusatan penduduk dan data jarak antarkecamatan untuk mengetahui besarnya keinginan bepergian masyarakat. Model skalogram dan indeks sentralitas menggunakan data jumlah fasilitas yang tersedia pada setiap kecamatan.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini adalah sebagai berikut:

- 1) bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo;

Sebagai bahan pertimbangan dalam memperatakan pembangunan agar tidak terjadi ketimpangan yang terlalu jauh antarkecamatan di Kabupaten Kulon Progo.

- 2) bagi masyarakat umum;

Untuk memberikan gambaran mengenai hierarki kecamatan di Kabupaten Kulon Progo yang dapat digunakan sebagai dasar penentuan harga yang wajar untuk transaksi properti.

- 3) bagi profesi penilai.

Untuk menganalisis kewajaran nilai yang dihasilkan dari proses penilaian. Selain itu, analisis hierarki wilayah juga dapat digunakan untuk mempermudah analisis pasar dan analisis *highest and best use*.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan menguraikan gambaran umum permasalahan yang diangkat dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini. Bahasan pada bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup pembahasan, manfaat penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan teori yang menjadi dasar pembahasan dan kerangka berpikir dalam penulisan. Bahasan pada bab ini meliputi definisi, teori, dan metode yang digunakan serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai inti dari bahasan yang diangkat dalam Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini. Bahasan tersebut mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum Kabupaten Kulon Progo, serta ketersediaan fasilitas pada masing-masing kecamatan. Bab ini juga akan menjelaskan mengenai penerapan metode yang digunakan untuk mengolah data yang didapatkan serta pembahasan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat pada bab I.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi mengenai simpulan dari penerapan metode dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab III. Simpulan tersebut berupa hierarki wilayah pada tingkat kecamatan di Kulon Progo berdasarkan tiap metode yang digunakan.